

MEMBACA “KUASA” *TROMPET MASJARAKAT*
DI SURABAYA TAHUN 1947-1965
(*Reading “The Power” of Trompet Masjarakat In Surabaya 1947-1965*)

Frendy Wijanarko, Krisnadi., Sunarlan
Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan No. 37, Jember 68121
email: meteorstrom@gmail.com

Abstrak

Surat kabar *Trompet Masjarakat* memiliki peranan penting dalam sejarah perkembangan pers di Indonesia. Istilah “kaum kecil” yang selalu digunakan dalam tajuk berita menjadikannya sangat menarik untuk dibahas lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan memahami kebijakan pemerintahan Soekarno pada surat kabar *Trompet Masjarakat* Tahun 1947-1965 dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Politik. Rumusan penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana sejarah kelahiran surat kabar *Trompet Masjarakat* di Surabaya? (2) Bagaimana kebijakan Soekarno di dalam surat kabar *Trompet Masjarakat*? (3) Bagaimana dampak pemberedelan surat kabar *Trompet Masjarakat* pada tahun 1965 terhadap redaksi? Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan sebagai berikut: pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa surat kabar *Terompet* membawa suara kaum “Republikein” untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setiap penerbitan mengandung kebijakan Soekarno yang diletakkan pada halaman pertama. Redaksi juga memperlihatkan kebijakan dari Soekarno secara serial dan selalu mendukung untuk melawan pihak yang tidak mendukungnya. Surat kabar *Trompet Masjarakat* dilarang terbit pasca-Tragedi G30S 1965. Redaksi surat kabar *Trompet Masjarakat* ditangkap dengan tuduhan ikut serta mendukung Tragedi G30S 1965.

Kata Kunci: Beredel, Kaum Kecil, Kebijakan, Soekarno

Abstract

Trompet Masjarakat newspaper has an important role in the history of press in Indonesia. The term “little people” are always used in the headlines make it very interesting to discuss in more depth. This research aims to understand the wisdom of Soekarno in *Trompet Masjarakat* newspaper 1947-1965 using the approach of Political Sociology. The formulation of this research are: (1) How the origin of *Trompet Masjarakat* newspaper in Surabaya? (2) How the wisdom of Soekarno in *Trompet Masjarakat* newspaper? (3) How the impact of the ban on *Trompet Masjarakat* newspaper in 1965 to the editor? This research uses historical method with the following steps: selection of topics, gathering sources (heuristics), criticism, interpretation, and historiography. The results of this research show that *Trompet Masjarakat* newspapers bring the voices of “Republicans” to defend the independence of Indonesia. Each publication contains the wisdom of Soekarno placed on the first page. Editors also shows the wisdom of Soekarno serially and always support him against those who do not support it. *Trompet Masjarakat* newspaper were banned after G30S 1965 tragedy. *Trompet Masjarakat* newspaper Editors arrested on charges of supporting G30S 1965 tragedy.

Keywords: Ban, Little People, Wisdom, Soekarno

1. Pendahuluan

Masa revolusi merupakan suatu masa yang penuh dengan semangat kebangkitan dan kebebasan pers bangsa Indonesia. Selama masa transisi kekuasaan dari pihak Belanda ke Indonesia, surat kabar dan terbitan lainnya terbilang cukup bebas. Pada masa ini juga telah lahir beberapa surat kabar, salah satunya adalah surat kabar *Harian Merdeka* pada tanggal 1 Oktober 1945. Pers masa ini merupakan alat yang sangat kuat dalam menggalang kekuatan dan menyebarkan semangat perjuangan rakyat Indonesia, meskipun dalam perjalanannya tidak sedikit mengalami

hambatan dalam perlindungan dan penyebarannya ke daerah-daerah terpencil.

Munculnya kebebasan pers yang ditandai maraknya penerbitan dan ketatnya persaingan, dengan semboyannya “Soeara Kaoem Ketjil Bebas Segala Pengaroeh,” majalah *Trompet Masjarakat* lahir di tengah-tengah masyarakat pada 20 September 1947. *Trompet Masjarakat* merupakan media cetak yang eksistensinya selalu tidak lepas dari pemberitaan golongan kecil pada masa itu seperti buruh, pedagang, nelayan, petani, pengusaha kecil, dan para tahanan di bawah umur. Segala hal yang menyangkut permasalahan sosial, politik maupun ekonomi rakyat

kecil baik di Jawa Timur maupun di daerah-daerah lainnya dimuat dalam surat kabar setiap harinya.

Trompet Masjarakat yang lahir setelah adanya serangan Belanda pada 21 Juli 1947 membawa semangat perjuangan demi mempertahankan suara republik di tengah-tengah ancaman dari *Regeerings Voorlichtings Dienst* (RVD). Wartawan *Trompet Masjarakat* memperlihatkan keuletannya dalam berjuang menghindari penangkapan oleh badan intelijen Belanda seperti *Veiligheids Dienst Mariniers Brigade* (VDMB), *Inlichtingen en Veiligheidsgroup* (IVG) dan *Netherlands Forces Intelligence Service* (NEFIS). Agar cepat sampai ke tangan para pelanggannya, penjualan dan peredaran *Trompet Masjarakat* secara sembunyi-sembunyi dan melalui cara-cara yang berani sehingga tidak diketahui oleh pihak Belanda.

Surat kabar *Trompet Masjarakat* mengalami pemberedelan terkait dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S). Penerbitan dan Peredaran *Trompet Masjarakat* dihentikan dan dilakukan pemeriksaan serta penahanan seluruh anggota redaksi oleh pihak militer. Penghentian penerbitan *Trompet Masjarakat* yang terjadi pada tahun 1965 merupakan bentuk pembelengguan pemerintah terhadap kebebasan pers.

Berbagai macam dinamika yang terjadi di masyarakat, surat kabar *Trompet Masjarakat* memiliki peranan yang penting dalam sejarah perkembangan pers di Indonesia. Kata-kata “kaum kecil” yang selalu digunakan dalam tajuk berita *Trompet Masjarakat* menjadikan surat kabar ini sangat khas dan menarik untuk dibahas lebih mendalam. *Trompet Masjarakat* menjadi surat kabar yang tetap kukuh dalam pendiriannya, meskipun hanya mampu bertahan kurang dari dua dekade. Namun demikian *Trompet Masjarakat* merupakan salah satu pers yang penting dan menarik untuk dikupas lebih dalam agar dinamika kehidupan pers masa lalu tidak hilang begitu saja dari memori kolektif masyarakat dan panggung pers di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah: (1) bagaimana sejarah surat kabar *Trompet Masjarakat* di Surabaya? Bagaimana kebijakan Soekarno di dalam surat kabar *Trompet Masjarakat*? (3) Bagaimana dampak pemberedelan surat kabar *Trompet Masjarakat* pada tahun 1965 terhadap redaksi?

Dengan mengkaji permasalahan tersebut, maka tulisan ini bertujuan untuk: (1) Penelitian ini menjelaskan latar belakang sejarah kelahiran *Trompet Masjarakat* yang terbit di Surabaya; (2) Penelitian ini bertujuan untuk memahami “kuasa” pemerintahan Soekarno pada surat kabar *Trompet Masjarakat*, mulai awal hingga pemberedelan yang terjadi dalam penerbitannya di

Surabaya; (3) Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemberedelan *Trompet Masjarakat* yang terjadi pada tahun 1965 terhadap redaksi dalam menyuarakan kebijakan-kebijakan pemerintahan Soekarno.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode sejarah. Menurut Kuntowijoyo, metode sejarah adalah cara-cara penelitian dan penulisan sejarah. Penelitian sejarah memiliki lima tahapan yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), kritik, interpretasi, dan historiografi. (Kuntowijoyo, 2005: 90).

Penulis menggunakan sumber pustaka seperti buku, jurnal, majalah, dan surat kabar. Banyak kajian berupa buku terkait dengan pers yang dapat dijadikan referensi serta pembanding untuk penulis seperti halnya “Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia,” (I. Taufik: 1977); “Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara.” (F. Rachmadi, 1990); “Perlawanan Pers Indonesia Badan Pendukung Soekarno (BPS) Terhadap Gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI).” (Tribuana Said, D. S. Moeljanto, 1983); “Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia.” (Tim SPS Pusat, 1971); dan “Majalah Kenang-Kenangan 5 Tahun *Trompet Masjarakat*.” (W.S. Kotambonan, 1952).

Tahap selanjutnya adalah kritik sumber meliputi kritik ekstern dan intern untuk menyeleksi data yang berasal dari hasil surat kabar, buku, jurnal ilmiah, terbitan berkala serta arsip yang diperoleh. Tahap selanjutnya berupa interpretasi (penafsiran) yakni dengan mengkomparasikan berbagai literatur buku terkait, artikel, jurnal serta arsip yang mempunyai bahasan yang sama dan menafsirkan fakta-fakta yang otentik dari data tersebut. Tahap selanjutnya yakni historiografi, dengan menyusun fakta-fakta yang diperoleh menjadi tulisan sejarah yang bersifat deskriptif analitis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan sejarah ilmiah.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi politik. Pendekatan sosiologi politik relevan dengan kebijakan-kebijakan Soekarno yang disuarakan oleh *Trompet Masjarakat* di Indonesia. Dengan demikian jelas bahwa sosiologi politik tidak dapat dilepaskan dari konsep masyarakat sebagai pokok perhatian sosiologi dan negara serta kekuasaan sebagai pokok perhatian politik. Dalam paparan masalah terkait pemerintah dan pers perlu melihat hubungan kekuasaan yang saling bergantung antara negara dan masyarakat sipil. Diantara negara dan masyarakat sipil

terdapat batas kekuasaan yang saling berhubungan dalam proses perubahan sosial.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hegemoni media (*media hegemony*) dari Antonio Gramsci. Menurut Antonio Gramsci, “struktur pemikiran rutin, *taken-for-granted*, memberikan kontribusi terhadap struktur kekuasaan.” (Werner J. Severin, James W. Tankard, Jr., 2001) Konsep yang terinspirasi dari Marxist ini menyatakan bahwa gagasan golongan yang berkuasa di masyarakat menjadi gagasan yang berkuasa di seluruh masyarakat. Media massa dipandang seperti dikendalikan oleh golongan yang dominan dalam masyarakat dan membantu golongan itu dalam menggunakan kekuasaannya atas seluruh masyarakat lainnya.

3. Hasil Penelitian

Perkembangan Surat Kabar “Republikein” di Surabaya

Bulan September sampai akhir tahun 1945, kondisi pers Republik Indonesia semakin kuat, yang ditandai oleh mulai beredarnya surat kabar Berita Indonesia, Merdeka, dan Warta Indonesia (Rosihan Anwar, 2015: 26, 27, 109). Pada masa itulah surat kabar digunakan sebagai alat untuk mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Sekalipun masih mendapat ancaman dari tentara Jepang, namun dengan penuh keberanian mereka menjalankan tugasnya. Dalam Agresi Militer Pertama tahun 1947, pers Indonesia terbagi dua. Golongan pertama bertugas di kota yang diduduki Belanda dan golongan kedua telah mengungsi ke pedalaman yang dikuasai Republik Indonesia. Sekalipun aktif di wilayah musuh, yang selalu dibayangi ancaman pemberedelan dan bersaing dengan surat kabar Belanda, golongan pertama menerbitkan surat kabar yang berhaluan “Republikein.” Surat kabar yang terkenal pada masa itu antara lain Merdeka, Waspada, dan Mimbar Umum. Demikian pula yang bergerilya ke pedalaman dengan peralatan dan bahan seadanya, surat kabar mereka senantiasa menjaga agar jiwa revolusi menyala. Pada masa itu telah beredar surat kabar kaum gerilya yang dicetak di atas kertas merang atau stensil, yakni Suara Rakyat, Api Rakyat, Patriot, Penghela Rakyat, dan Menara.

Surat kabar “Republikein” di Surabaya yang bermunculan pada periode revolusi antara lain Suara Rakyat, Pewarta Perniagaan, Merah Putih, Indonesia Merdeka, Berita Indonesia, Penyebar Semangat, dan Joyoboyo. Surat kabar di luar Surabaya juga bermunculan laksana cendawan di musim hujan, misalnya Api Rakyat di Madiun, Bhakti di Mojokerto,

dan Berjuang di Malang (Wartini Santoso, 1984: 1810-1984).

Surat kabar “Republikein” di Surabaya sejak kemerdekaan tidak pernah absen dalam perjuangan, karena sejak proklamasi kemerdekaan orang-orang yang terlibat dalam bidang pers berjuang dengan ketajaman pena, mengorbankan semangat serta memberikan penerangan yang luas untuk tujuan perjuangan. Pers sebagai media yang sangat berperan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hadir begitu saja di tengah-tengah masyarakat, tetapi pers secara lambat laun dikenal dan akhirnya mewabah sebagai sarana informasi yang merakyat.

Surat kabar “Republikein” di Surabaya yang lahir pada masa revolusi tidak menitikberatkan terhadap upaya untuk mencari keuntungan, akan tetapi semata-mata demi perjuangan dan pengabdian yang tulus terhadap bangsa dan negara. Pada masa perjuangan, peranan pers sejalan dengan pergerakan nasional yang mengarah pada pemberitaan tentang republik, maka dorongan ke arah kemerdekaan tumbuh bersama dan saling memupuk satu sama lain.

Perkembangan Surat Kabar “Non-Republikein” di Surabaya

Demi membendung suara-suara mendukung Kemerdekaan Republik Indonesia di tengah-tengah gencarnya kemunculan surat kabar “Republikein,” pihak Sekutu pada akhirnya menerbitkan surat kabar “Non-Republikein” di Surabaya. *Allied Military Administration-Civil Affairs Branch* (AMACAB) menerbitkan surat kabar News pada 20 November 1945 di bekas kantor surat kabar Soeara Rakjat (*Aloon-Aloon Straat* 30) yang telah direbut tentara Sekutu di Surabaya. Surat kabar News diterbitkan dalam dwi bahasa yaitu Inggris dan Indonesia yang berfungsi sebagai media penerangan kebijakan Sekutu kepada penduduk Kota Surabaya. Bahasa Inggris digunakan oleh Sekutu sebagai penguasa atau pengatur kota, sedangkan bahasa Indonesia digunakan oleh masyarakat yang diatur. Kertas yang digunakan untuk mencetak surat kabar berwarna hijau muda dan kuning. Surat kabar News digunakan Sekutu sebagai alat untuk mengatur penduduk Surabaya dengan menggunakan dwi bahasa maka berita yang ditulis menggunakan bahasa Inggris dapat dipahami oleh penduduk yang hanya mengerti bahasa Indonesia.

Penerbitan surat kabar News dihentikan ketika AMACAB digantikan oleh RECOMBA Jawa Timur pada 1 Maret 1946. RECOMBA melalui RVD menerbitkan surat kabar “Non-Republikein” bernama Pelita Rakjat (1947-1948) di tempat percetakan yang sama dengan surat kabar News. Pelita Rakjat digunakan oleh RECOMBA untuk memberikan

informasi dan penerangan kepada daerah-daerah yang telah diduduki. Pelita Rakjat merupakan surat kabar yang mendukung pemerintahan Belanda dan melawan suara-suara yang mendukung pihak Republik Indonesia.

Para pengusaha penerbitan pers milik kaum kapitalis gula berusaha menerbitkan surat kabar “Non-Republikein” bernama Niew Soerabaiasch Handelsblad (1945-1957). Niew Soerabaiasch Handelsblad hanya terbit di Surabaya tahun 1945-1950, karena di Surabaya merupakan kota yang aman untuk tempat tinggal orang-orang Belanda. Surat kabar ini merupakan surat kabar berbahasa Belanda yang dipergunakan selain untuk menawarkan barang hasil industri, iklan keluarga dan iklan film yang akan diputar di Surabaya juga memojokkan usaha serta kegiatan bangsa Indonesia.

***Trompet Masjarakat* Edisi yang Pertama**

Akhirnya, pada 20 September 1947, *Trompet Masjarakat* terbit menjadi sebuah majalah bulanan dengan dua halaman dan tiap-tiap halaman terdiri dari 2 kolom yang dapat memuat 4 ruangan berita. Dewan Redaksi tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar ongkos percetakan dan pembelian kertas untuk mencetak majalah, sehingga majalah hanya mampu dicetak oleh percetakan Agil dengan ukuran yang tidak terlalu besar yaitu dalam ukuran 27 cm X 36 cm serta diterbitkan setiap satu bulan sekali. Begitu juga dengan wartawan yang mengalami kesulitan berhadapan dengan tentara-tentara Belanda dalam mencari dan mengumpulkan berita di daerah kekuasaan Belanda, maka alasan tersebut juga mendorong Dewan Redaksi untuk memilih menerbitkannya dalam bentuk majalah bulanan.

Majalah *Trompet Masjarakat* edisi perdana memulai *masthead* (kepala majalah atau surat kabar) pada halaman pertama. Logo “*Trompet Masjarakat*” diletakkan oleh Dewan Redaksi pada kolom pojok atas sebelah kiri. Nama majalah ini merupakan hasil karya Goei Poo Aan dan memiliki makna yang mendalam bagi redaksi dan pembaca-pembacanya. Kata “*Trompet*” identik dengan alat musik tiup dan apabila dimainkan akan terdengar nyaring di telinga orang-orang yang berada di sekitarnya, sehingga “*Trompet*” digunakannya sebagai alat untuk menyuarakan suara-suara rakyat secara lantang serta mampu menggugah perasaan siapa saja yang mendengarkannya. Majalah ini merupakan sebuah simbol yang bermakna menyuarakan secara lantang keberadaan “kaum kecil” dan menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat secara lantang tanpa membawa kepentingan-kepentingan dari golongan tertentu. Selain itu, dengan adanya logo ini, pembaca dari segala pelosok daerah akan dapat

mengetahui, mengenal, dan tertarik untuk segera mendapatkan dan membaca majalah ini.

Demi memudahkan penjaja majalah dan pembeli dalam bertransaksi dan tidak diketahui oleh tentara-tentara Belanda, maka diputuskan untuk ukuran kertas percetakan *Trompet Masjarakat* yang digunakan tidak terlalu besar (27 cm X 36 cm). Masyarakat akan mudah membawa dan menyimpan *Trompet Masjarakat* secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh pihak Belanda. Diterbitkan untuk promosi, *Trompet Masjarakat* dalam edisi yang pertama menampilkan isi berita yang cukup padat meskipun dengan ukuran yang kecil. Tiap-tiap halaman majalah terdiri dari 2 kolom yang dapat memuat dua hingga empat judul berita dalam negeri. Ruang judul diletakkan pada halaman pertama di bagian pojok kiri atas, ruangan berita yang dapat memuat 6 judul berita berisi berita-berita dalam negeri diletakkan di bagian tengah, dan ruangan iklan diletakkan di bagian pojok kanan bawah majalah. Penerbitan yang pertama bagi *Trompet Masjarakat* merupakan suatu langkah awal dalam tugas dan tanggung jawab insan pers dalam memberikan informasi dan penerangan yang jelas.

Pendiri *Trompet Masjarakat*

Sejak bertindak sebagai Direktur Utama *Trompet Masjarakat* di Surabaya, Goei Poo Aan memperlihatkan eksistensi majalah ini dengan terbitan yang berkualitas pada masa Agresi Militer Belanda Pertama. Lahir di Madiun pada tahun 1905 dan aktif menekuni bidang persuratkabaran serta mendirikan *Trompet Masjarakat* pada tahun 1947 hingga tahun 1965. Ia tidak memiliki pendidikan formal ketika masih muda (Leo Suryadinata, 2015: 43), namun pada akhir 1920-an pindah ke Surabaya dan belajar di *Burger Avondschoon* (sederajat dengan SLTP). Goei juga telah bekerja sebagai editor untuk berbagai surat kabar China peranakan di Jawa sejak 1925, pertama dengan *Perniagaan*, kemudian dengan *Sin Jit Po*, *Sin Tit Po*, dan *Matahari*.

Sebagai seorang “Republikein,” Goei Poo Aan memiliki kekaguman terhadap sosok Soekarno, terwujud dalam perilaku dan ide-idenya yang dituangkan pada karya-karya jurnalistik. Pembelaan Soekarno terhadap rakyat kecil mengilhaminya di dalam aktivitas persuratkabaran, sehingga hampir setiap terbitan *Trompet Masjarakat* dalam tajuk berita memunculkan kebijakan-kebijakan pemerintahan Soekarno. Keaktifannya dalam persuratkabaran tidak hanya dilakukan dengan memuat kebijakan-kebijakan Soekarno dalam *Trompet Masjarakat*, namun juga terjun ke lapangan secara langsung. Sepanjang perjalanan persnya, Goei tidak sedikit menemui kendala-kendala dalam menuangkan ide-ide radikal dan berani dalam tiap-tiap terbitan *Trompet*

Masjarakat. Beberapa peristiwa yang menunjukkan eksistensinya dalam membela kepentingan “kaum kecil” adalah pembelaan terhadap 4 orang buruh Pabrik Rokok Faroka Malang (Oei Hiem Hwie, 2015: 98) dan persoalan tulisan yang dimuat dalam surat kabar tanggal 18 Agustus 1951 tentang “Penangkapan-Penangkapan di Jakarta” (Tatang Istiawan, 1994: 251-253).

Menurut Sam Setyautama, pada tahun 1966 Goei Poo Aan telah disebutkan telah meninggal dunia. Pasca-pemberedelan yang terjadi dalam tubuh *Trompet Masjarakat* hingga awal bulan Oktober 1965 Goei masih hidup dan ditahan di Penjara Lowokwaru Malang. Menurut keterangan seorang wartawan *Trompet Masjarakat*, Oei Hiem Hwie (Oei Hiem Hwie, 2015: 95), penyebab kematian Goei Poo Aan adalah penyiksaan yang dilakukan oleh pihak militer yang mengebonnya (meminjam terdakwa/ tersangka untuk dimintai keterangan) di Penjara Lowokwaru Malang. Dalam perjalanan pers yang begitu singkatnya, Goei memberikan banyak sumbangsih terhadap perkembangan dan pertumbuhan pers di Jawa Timur dan hal tersebut sangat membekas dalam ingatan insan pers.

***Trompet Masjarakat* Pada Awal Penerbitan**

Edisi kedua *Trompet Masjarakat* muncul pada 20 Oktober tahun 1947. Berbeda dengan edisi yang pertama pada edisi kedua ini muncul dengan ukuran 24 cm X 32 cm terdiri dari empat halaman. Pada edisi kedua ini nampak ruangan tajuk rencana bernama “Antjoa.” Sama halnya dengan edisi yang pertama, dalam edisi yang kedua juga disediakan kolom iklan yang hanya diisi oleh produk kertas rol untuk bahan percetakan dengan merk The Glory Production dan dapat didapatkan pada Commissiehandel The Yan Wan di Jalan Kembang Cepun nomor 140 serta Toko Buku Linggarjati di Jalan Peneleh nomor 36. Dewan Redaksi bekerja sama dengan Abubakar (pemilik Percetakan Agil) memutuskan untuk menetapkan tanggal penerbitan majalah pada mulanya terbit satu bulan sekali pada September tahun 1947, sejak edisi ketiga yang terbit tanggal 10 Desember 1947 menjadi terbit setiap tanggal 10, 20 dan 30 atau tiga kali terbit dalam satu bulan. Penerbitan selama tiga kali setiap satu bulan belum dapat dilakukan pada bulan November dan baru mulai diberlakukan oleh Dewan Redaksi pada tanggal 10 Desember tahun 1947. Hal tersebut dilakukan agar Dewan Redaksi memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan penerbitan majalah ini yang akan dilakukan tiga kali dalam satu bulan agar majalah ini menghasilkan berita-berita yang bermutu.

Semangat yang selalu mengiringi langkah *Trompet Masjarakat* tertuang dalam sebuah slogan “Soeara Kaoem Ketjil Bebas Segala Pengaroeh.” Slogan ini pertama kali ditampilkan secara jelas pada terbitan majalah bulanan *Trompet Masjarakat* edisi kedua pada bulan Oktober 1947. Kalimat yang terdiri dari beberapa kata tersebut meskipun terlihat sederhana tetapi mampu menjadi sebuah ikonis dalam sebuah terbitan majalah bulanan. Makna yang terkandung dalam slogan ini membawa semangat perjuangan para pejuang kemerdekaan anti pendudukan Belanda. *Trompet Masjarakat* memberikan kekuatan terhadap “kaum kecil” yang lemah dan tidak berdaya untuk menghadapi serangan Belanda melalui media pers. Kekuatan yang berasal dari seluruh “kaum kecil” tanpa didasari kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, digalang oleh satu suara dalam *Trompet Masjarakat* dalam menghadapi segala ancaman Belanda.

Kalimat “Soeara Kaoem Ketjil Bebas Segala Pengaroeh” yang dibawa oleh *Trompet Masjarakat* menjadi sebuah semboyan yang setia mengiringi setiap penerbitannya. Slogan ini memperlihatkan gambaran kondisi masyarakat pada masa Agresi Militer Belanda Pertama. Dalam slogan tertulis “Soeara Kaoem Ketjil” yang berarti suara-suara rakyat jelata yang tidak bersedia bekerja sama dengan pemerintahan Belanda dan “Bebas Segala Pengaroeh” yang berarti tidak terikat dengan kepentingan pemerintahan Belanda, merupakan dua kalimat yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Suara-suara rakyat jelata yang tidak bersedia bekerja sama demi kepentingan pemerintahan Belanda, menjadi sebuah kalimat penting yang memberikan motivasi dalam sekap terjang majalah ini.

Keberadaan slogan *Trompet Masjarakat* di bawah logo majalah juga memperkuat makna logo majalah yang berarti kelahirannya semata-mata hanya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Slogan *Trompet Masjarakat* yang diciptakan oleh Goei Poo Aan di Surabaya, terinspirasi dari kekagumannya terhadap sosok Presiden Soekarno yang memperjuangkan nasib “kaum kecil” untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Soekarno merupakan sosok yang menginspirasi dalam menerbitkan sebuah majalah yang memiliki tujuan yang sama. Semangat Soekarno dibawa oleh Goei Poo Aan melalui slogan majalah dan tidak hanya digunakan sebagai identitas sebuah majalah, namun juga sebagai pembakar semangat Dewan Redaksi serta pembaca-pembacanya dalam menegakkan kemerdekaan.

Edisi kedua *Trompet Masjarakat* telah dicetak sebanyak 1000 eksemplar sebagai edisi khusus untuk promosi majalah. Jumlah cetakan edisi kedua yang mencapai hingga 1000 eksemplar membuat majalah ini semakin dikenal oleh masyarakat. Dewan Redaksi tidak hanya menginginkan adanya peningkatan oplah,

namun juga untuk meningkatkan kualitas penerbitan yang lebih baik, sehingga dalam edisi ini juga telah ditampilkan harga jual majalah. Sebuah ruangan yang terletak di bawah slogan dalam edisi ini (Oktober 1947) memberikan informasi bahwa majalah terbit tiga kali dalam satu bulan dan didapatkan secara berlangganan selama satu kuartal atau tiga bulan dengan harga 2.50 gulden.

Dewan Redaksi memuat daftar nama dan alamat agen penjualan *Trompet Masyarakat* pada edisi kelima. Daftar agen penjualan yang dicantumkan oleh Dewan Redaksi bertujuan agar pelanggan dapat mengetahui dan mendapatkan majalah secara mudah. Agen-agen penjualan berada di toko buku Ampel Suci nomor 37, Reparatie Nyamplungan nomor 5, toko buku Linggarjati Peneleh nomor 36 yang berada di Surabaya. Tidak hanya di Surabaya, majalah ini juga dapat didapatkan di S.D.M. Sarikat Dagang Jalan Brantas yang berada di Mojokerto dan Giam Oen Gie Karangasem di Pulau Bali, serta An Lok Jalan Belanda nomor 28 di Makassar.

Pada tanggal 10 Januari 1948 kantor Tata Usaha *Trompet Masyarakat* pindah ke Jalan Sambongan nomor 32 Surabaya, bersamaan dengan terbitnya majalah edisi yang keenam. Perpindahan bagian Tata Usaha majalah ini disebabkan oleh pemisahan tugas yang terkait dengan redaksi majalah yang dipimpin oleh Goei Poo Aan dan pada bagian Tata Usaha dipimpin oleh Han Hien Liong, sehingga kantor redaksi tetap berada di Jalan Tientsin nomor 12 Surabaya, sedangkan administrasi berada di Jalan Sambongan nomor 32 Surabaya.

Penyebab kepindahan kantor Tata Usaha *Trompet Masyarakat* pada Mei tahun 1948 dari Jalan Sambongan nomor 32 ke Jalan Kampemen nomor 113 terkait dengan pengunduran diri Han Hien Liong. Han Hien Liong (Ketua Tata Usaha *Trompet Masyarakat* hingga Mei tahun 1948 yang selanjutnya digantikan oleh Kotambonan) mengundurkan diri tanpa ada keterangan dari pihak Dewan Redaksi, sehingga kantor Dewan Redaksi dan Tata Usaha majalah ini menjadi satu atap di Jalan Kampemen nomor 113.

Mula-mula pada bulan Mei, Juni dan Juli tahun 1948 (edisi ketujuh belas hingga edisi kedua puluh tiga) *Trompet Masyarakat* terbit secara berkala setiap enam hari sekali. Penerbitan secara harian atau setiap hari baru rutin dilakukan oleh Dewan Redaksi *Trompet Masyarakat* pada pertengahan bulan Juli tahun 1948 (edisi kedua puluh empat). Perubahan dari majalah bulanan menjadi surat kabar harian pada tahun 1948 juga menandai perubahan yang serius di dalam Dewan Redaksi dan Tata Usaha *Trompet Masyarakat*.

***Trompet Masyarakat* Pasca-Agresi Militer Belanda Pertama**

Kekecewaan rakyat Indonesia terhadap kekuasaan pihak Belanda ditunjukkan *Trompet Masyarakat* dalam edisi pertama yang berjudul "Tersapunya Tenaga-Tenaga Di Semua Lapangan yang Merugikan Kepentingan Kaum Kecil Berarti Kembalinya Kepercayaan Rakyat Segala Bangsa." Masyarakat menghadapi berbagai macam permasalahan di dalam pemerintahan pihak Belanda yang tidak menemui ujung pangkalnya, sehingga membuat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dalam situasi yang mencekam dan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pihak Belanda, secara tiba-tiba Belanda membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak.

Kekuasaan Belanda di Jawa Timur pasca-Agresi Militer Pertama membuka jalur masuknya barang-barang, seperti beras, gula, dan palawija dari luar daerah kekuasaan republik, sehingga membuat pedagang menderita kerugian karena harga barang-barang mengalami penurunan drastis. *Trompet Masyarakat* mendukung pedagang-pedagang dalam menyuarakan suaranya melawan pihak Belanda atas penguasaannya di beberapa daerah kekuasaan republik pada berita berjudul "Perdagangan dan Pergerakan Masyarakat." Rubrik ini berisi Agresi Militer Pertama Belanda mengakibatkan terbukanya blokade beras, gula dan tanaman-tanaman palawija di Surabaya. Tidak sedikit pedagang di Surabaya mengalami kerugian besar sebagai akibat peristiwa ini. Turunnya harga beras dan gula yang sangat drastis membuat pedagang harus merugi dari hasil penjualan yang didapatkan dalam beberapa bulan berselang Belanda baru menduduki Porong dan Mojokerto. Begitu juga dengan pedagang kain dan pedagang kelontong yang ikut menderita kerugian.

Trompet Masyarakat kembali secara tegas mendukung perjuangan "kaum kecil" dalam melawan kebijakan-kebijakan Belanda pada edisi kedua, 30 Oktober 1947, berjudul "Terputusnya Gambar Masyarakat." Edisi ini membahas nasib "kaum kecil" yang selalu hidup penuh dengan penderitaan di bawah kekuasaan Belanda. Dewan Redaksi menganggap Belanda selalu berlaku sewenang-wenang terhadap "kaum kecil" dan mereka mendorong pembaca yang didominasi oleh golongan "kaum kecil" agar dapat berbenah diri menjadi golongan rakyat yang terbesar dan tidak mudah diperlakukan sewenang-wenang oleh Belanda.

Trompet Masyarakat melakukan pembelaan terhadap "kaum kecil" sebagaimana ide-ide Soekarno, Marhaen, yang tertuang dalam slogan "Soeara Kaoem Ketjil Bebas Segala Pengaroeh." Sebagaimana ditegaskan oleh Soekarno, Marhaenisme merupakan deskripsi ketertindasan masyarakat Indonesia akibat praktik pengisapan ekonomi eksploitatif yang dijalankan

negara-negara Barat semasa kolonial. Representasi “kaum kecil” dalam ideologi kejuangan nasionalisme telah dielaborasi oleh Soekarno. Ini merupakan basis pemikiran Soekarno yang menyuarakan sikap kritisnya terhadap kesenjangan ekonomi sebagai akibat sistem ekonomi yang tidak berpihak kepada “kaum kecil” atau struktur ekonomi yang dikuasai oleh kelompok/kasta sosial tertentu.

Pembelaan yang dilakukan oleh Trompet Masyarakat terhadap kaum “Republikein” semakin lama semakin gencar, sehingga membuat Belanda harus turun tangan untuk menghadapi suara-suara yang pro terhadap republik. Upaya pemberedelan Belanda terhadap majalah ini dimuat oleh Dewan Redaksi dalam edisi kesebelas, 1 Maret 1948, berjudul “*Trompet Masyarakat* Menghadapi Putusan Dewan Persuratkabaran untuk Penerbitannya Lebih Jauh.” Pada 26 Februari 1948, majalah ini dilarang terbit karena dianggap Belanda tidak memiliki izin untuk menerbitkan majalah. Dewan Redaksi melawan kebijakan-kebijakan Belanda dengan menyebutkan, bahwa jika pemerintahan Belanda berdasarkan *democratie* (demokrasi) maka tidak ada alasan yang kuat untuk menghentikan terbitnya *Trompet Masyarakat* dan sebelum Agresi Militer Pertama terjadi, tidak terdapat aturan yang menyebutkan suatu penerbitan harus memiliki izin terbit terlebih dahulu. Sembari menunggu keputusan Belanda terkait dengan izin penerbitan, majalah ini dapat terus terbit dan keputusan yang akan diambil nantinya akan memperlihatkan kemerdekaan pers di bawah kebijakan-kebijakan Belanda.

Trompet Masyarakat kembali memberitakan upaya perlawanan yang dilakukan oleh Belanda pada 18 Maret 1948, dalam edisi ketiga belas dengan tajuk “*Trompet Masyarakat* Buat Pertama Kali di Meja Justitie.” Berangkat dari peristiwa yang dialami Dewan Redaksi, 18 Maret 1948 pukul 12.30 WIB, tidak terlepas dari sifat Dewan Redaksi *Trompet Masyarakat* yang mendukung suara-suara kaum “Republikein” untuk tidak bersikap kooperatif dengan Belanda. Majalah ini mengkritik kebijakan-kebijakan Belanda pada edisi kesembilan, 10 Februari 1948, berjudul “Aturan-Aturan Pemerintah Menyusahkan Kaum Kecil Segala Bangsa.” Berita ini dimuat oleh redaksi sebagai upaya untuk menanggapi pejabat-pejabat Belanda yang korup. Dukungan terhadap “kaum kecil” terus menerus dilakukan oleh majalah ini demi memperjuangkan nasibnya. Pemerintahan Belanda dianggap gagal memperbaiki kehidupan rakyat dan kebijakan-kebijakannya belum dapat merangkul rakyat Indonesia yang berada di dalam daerah kekuasaannya.

Belanda kembali mengadakan perlawanan dengan cara memberedel *Trompet Masyarakat* edisi 23 Oktober 1948, terkait berita yang berjudul “Tegen

Resolusi dari Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) Mojokerto.” Harian ini memberitakan tentang pertentangan antara DPRS Kabupaten Panarukan dengan DPRS Mojokerto terkait pemilihan anggota DPRS. DPRS Mojokerto menginginkan pemilihan wakil-wakil rakyat sesuai dengan wilayah kabupaten dan tidak menyetujui cara pemilihan menurut aliran-aliran politik. Pemberitaan ini memunculkan suasana yang tidak kondusif bagi Belanda, sehingga Dewan Redaksi harus diperiksa dan diberedel oleh PID.

Pemberedelan ini hanya berlaku selama 41 hari (23 Oktober-2 Desember 1948) dan pada 13 Desember 1948 surat kabar ini diperbolehkan terbit kembali. Selama 41 hari *Trompet Masyarakat* telah berhenti beraktivitas tetapi dengan adanya peristiwa tersebut pihak redaksi tetap kukuh melaksanakan peliputan dan menulis berita menyuarakan suara-suara Republik Indonesia. Hal ini membuat surat kabar ini mampu bangkit dan tetap bergairah mempertahankan keutuhannya dari peristiwa-peristiwa yang telah dialaminya.

Pasca-perjanjian Renville (Tim Peneliti dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Jawa Timur, 1976: 183), kondisi *Trompet Masyarakat* hampir sepenuhnya bangkrut, Redaksi dan Tata Usaha menjadi satu ruangan, Goei Poo Aan, Kotambonan, Bahalwan dan Mahmud merupakan Dewan Redaksi yang tersisa dan tetap gigih berjuang mempertahankan suara-suara “Republikein.” Masalah utama yang dihadapi Dewan Redaksi adalah pemasukan yang kurang stabil pasca pemberedelan selama 41 hari. Penghasilan hanya bersumber dari iklan yang jumlahnya tidak cukup untuk mendapatkan kertas. Walaupun dana untuk pembelian kertas telah tersedia, harga kertas melambung tinggi sehingga *Trompet Masyarakat* mau tidak mau harus berhutang. Begitu juga dengan pelanggan yang memasang iklan mulai mundur satu-persatu, hal tersebut disebabkan karena timbul rasa takut terhadap suara-suara “Republikein” *Trompet Masyarakat* yang radikal dan seringkali mengkritik kebijakan-kebijakan Belanda. Tidak hanya itu, pada 17 Desember 1948, pukul 19.00 WIB, rumah Kotambonan digeledah oleh tentara-tentara Belanda, arsip Tata Usaha dari penerbitan majalah Bangun dan bendera dari perhimpunan olahraga yang berwarna merah-putih juga disita serta ia langsung dibawa oleh Belanda ke penjara Bubutan.

Agresi Militer Kedua terjadi pada 19 Desember 1948, mengakibatkan turunnya oplah harian *Trompet Masyarakat* secara drastis, dari 1800 eksemplar menjadi 1700 eksemplar, 1500 eksemplar, hingga menunjukkan angka 1000 eksemplar. Bulan Februari 1949, oplah menunjukkan penurunan yang sangat drastis yakni pada angka 900 eksemplar. Akibat dari [Agresi Militer Kedua](#), pihak internasional melakukan

tekanan kepada pihak Belanda, terutama dari pihak **Amerika Serikat** yang mengancam akan menghentikan bantuannya kepada pihak **Belanda**. Pada akhirnya dengan terpaksa pihak **Belanda** bersedia kembali berunding dengan Indonesia. Pada tanggal **8 Mei 1949**, RI dan **Belanda** menyepakati **Perjanjian Roem-Royen** (M.C. Ricklefs, 1991: 349). Tiga hari pasca-perjanjian ini, Kotabombon (anggota dewan redaksi) dibebaskan oleh Belanda dari penjara Bubutan.

Razia Agustus dan Rubrik “Surabaya Sehari-hari”

Pada masa Agresi Militer Belanda, *Trompet Masyarakat* mengartikan “kaum kecil” sebagai rakyat Indonesia yang dijajah, sedangkan pada demokrasi liberal “kaum kecil” merupakan rakyat jelata yang tertindas oleh sistem kapitalis (Oei Hiem Hwie, 2015: 97). Pada masa Demokrasi Liberal, *Trompet Masyarakat* semakin berani menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia terhadap wakil-wakil rakyat, namun tetap berpegang teguh pada pandangan hidup Soekarno, seperti yang dilakukan oleh pendiri surat kabar ini, Goei Poo Aan. Goei memang dikenal pemberani, memiliki komitmen pada pembelaan rakyat kecil, dan berpandangan luas. Ia yang selalu memakai inisial G.P.A. di tajuk rencana yang ditulisnya, menempatkan kejujuran dan menghargai lawan di setiap tulisannya. Bukan saja lawan, kawan sendiri pun akan dikritiknya secara tajam bila berlaku tidak adil atau merugikan kepentingan bangsa. Salah satu kritik Goei yang tajam terlihat pada upaya perlawanan-perlawanannya terhadap kebijakan-kebijakan Kabinet Sukiman yang berlangsung sejak 26 April 1951 hingga 23 Februari 1952 (Edward C. Smith, 1983: 101).

Sebuah peristiwa yang dikenal dengan “Razia Agustus” menyebabkan ketakutan terhadap para pelanggan dan pembaca *Trompet Masyarakat*. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa ditangkannya Goei Poo Aan atas tulisan yang dimuatnya dalam *Trompet Masyarakat* edisi 13 Agustus 1951 berjudul “Kaum Kiri Tetap Buat Sasaran Karena Banyak Koloni Ke-V Bersarang dalam Pemerintahan bergandengan dengan Kapitalis Imperialis Asing” dan di dalam *Trompet Masyarakat* edisi 18 Agustus 1951 berjudul “*Trompet Masyarakat* Sesalkan Cara Penangkapan Orang-Orang Penting di Jakarta Pemerintah Seakan-Akan Mata Gelap Dalam Hal Ini Pemerintah Belanda Masih Lebih Bijaksana.” Pada tanggal 18 Agustus 1951, ia dibawa oleh polisi untuk dibawa ke kantor hopbiro (kantor pusat). Pemeriksaan terhadap Goei Poo Aan berlangsung selama 101 hari dan ia dibebaskan pada tanggal 26 November 1951.

Pada akhir tahun 1955, *Trompet Masyarakat* melakukan pembelaan terhadap “kaum kecil” yang berada pada Serikat Buruh Kendaraan Bermotor (SBKB) Surabaya dan Serikat Buruh Es (SBE)

Ranting Petojo. *Trompet Masyarakat* melihat perlakuan majikan yang sewenang-wenang terhadap buruh-buruh dan perlakuan majikan yang sewenang-wenang terhadap buruh akan segera dikritik oleh harian ini pada sebuah rubrik “Surabaya Sehari-hari” dengan pandangan berpihak pada “kaum kecil.”

Gaya penyajian berita *Trompet Masyarakat* yang tajam dan berpihak pada “kaum kecil” selalu terdapat pada berita-berita yang dimuatnya hingga menjelang Pemilihan Umum pada akhir tahun 1955. Partai politik dan perorangan yang terdaftar sebagai peserta pemilihan umum untuk DPR dalam daerah Surabaya berjumlah 53, sedang untuk Konstituante sejumlah 47 dalam Pemilihan Umum September dan Desember 1955.

Menyuarakan Ajaran-Ajaran Bung Karno: Soekarno Menuju Kekuasaan dengan Lambang dan Slogan

Sejak dimulainya Demokrasi Terpimpin tahun 1959, semua penerbitan pers di Indonesia, baik majalah maupun surat kabar harian, diharuskan memuat “Ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno,” baik yang berupa pidato-pidato kenegaraan maupun tulisan-tulisan yang lain (Tatang Istiawan, 1994: 309). Pemuatan ajaran ini dapat dilakukan secara keseluruhan atau secara sepenggal yang dapat dibagi dalam beberapa serial. Setiap kali penerbitan majalah atau surat kabar wajib mencantumkan tulisan mengenai “Ajaran-Ajaran Bung Karno.” Demi menjalankan kebijakan-kebijakan Soekarno, *Trompet Masyarakat* menyediakan 3 buah kolom pada halaman 2 yang terletak di kanan atas. *Trompet Masyarakat* edisi 6 Oktober 1965, memuat “Ajaran-Ajaran Bung Karno” secara serial hingga mencapai seri ke-201. Edisi ini memuat ajaran-ajaran tentang “Apa sebab Turki Memisahkan Agama dari Negara?.” Pada edisi 9 Oktober 1965 tulisan terkait ajaran-ajaran ini dimuat pada halaman 1 kolom 1-2 dan masih dengan tema pembicaraan dan seri yang sama.

Bentuk interaksi antara kebijakan Soekarno dan *Trompet Masyarakat* tercermin pada edisi Sabtu 26 Maret 1965 yang memuat berita berjudul “Presiden Soekarno: Marhaenisme adalah Teori Perjuangan.” Edisi ini menceritakan tentang aktivitas Presiden Soekarno dalam memberikan pesan-pesan perjuangan kepada 15.000 kader pelopor Marhaenis. Marhaenisme menurut Soekarno bukan sekedar teori politik namun pada hakikatnya merupakan teori perjuangan guna mempersatukan seluruh aksi massa progresif yang revolusioner. Selain itu, paham ini juga merupakan semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk menemukan kesejahteraan dalam berbagai aspek.

Trompet Masyarakat dalam setiap penerbitannya juga wajib memuat berita-berita yang bernapaskan

pada Nasionalisme, Agama dan Komunisme (NASAKOM). Dasar pemikiran Soekarno yang menjadi landasan pacu *Trompet Masyarakat* dalam sepak terjangnya merupakan sebuah awal yang positif dalam aktivitas persuratkabaran di Surabaya. Tidak sedikit pikiran-pikiran Soekarno yang tertuang dalam tajuk utama terbitan *Trompet Masyarakat* dan kebijakannya selalu mendapat dukungan dari Dewan Redaksi, sehingga suasana surat kabar terasa kental akan sosok Soekarno. Gagasan mempersatukan ketiga paham tersebut dalam sebuah pemerintahan dengan doktrin NASAKOM, muncul karena kekhawatiran Soekarno akan perpecahan bangsa Indonesia jika ketiga golongan di atas dibiarkan saling bertentangan.

Doktrin NASAKOM nampak pada tajuk *Trompet Masyarakat* edisi 5 Januari 1965 yang berjudul "Ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno: Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme." Tajuk ini menjelaskan betapa pentingnya peran Nasionalisme, Islamisme dan Komunisme (NASAKOM) terhadap persatuan bangsa Indonesia. Dalam edisi ini bercerita tentang perselisihan yang terjadi di antara masyarakat terkait dengan keberadaan Marxisme. Soekarno mengatakan bahwa Komunisme di Indonesia merupakan hal yang baru dan tidak menolak untuk bekerja sama dengan Nasionalis dan Islamis di Asia.

Presiden Soekarno memerintahkan kepada Front Nasional, partai-partai politik, organisasi-organisasi, golongan-golongan karya di seluruh Indonesia supaya bersama-sama dengan alat-alat negara dan alat-alat revolusi lainnya meresapkan dan mengamalkan ajaran-ajaran revolusi Indonesia yaitu: NASAKOM, Pancasila, Manipol/ USDEK, Trisakti Tavip dan Berdikari (Berdiri di Atas Kaki Sendiri). Lima azimat revolusi Indonesia (NASAKOM, MANIPOL, TRISAKTI TAVIP dan BERDIKARI) kini menyebarkan pengaruh-pengaruhnya ke seluruh benua Asia dan Afrika serta membangkitkan kekuatan *New Emerging Forces* (NEFO) dalam perlawanan menentang *Old Established Forces* (OLDEFO).

Nilai-nilai NASAKOM yang terkandung di dalam Pancasila dikupas oleh Soekarno pada *Trompet Masyarakat* edisi Kamis 4 Juni 1965 yang berjudul "Pancasila jika Diperas jadi Gotong Royong dan NASAKOM." Presiden Soekarno dalam amanatnya kepada 16.000 orang peserta kursus kader NASAKOM menyatakan bahwa Pancasila jika diperas dapat menjadi gotong royong dan dapat juga menjadi NASAKOM. Ditegaskan bahwa gotong royong adalah NASAKOM, sebaliknya NASAKOM adalah gotong royong. Pada intinya ketiga hal tersebut dipersatukan dalam satu tujuan yaitu gotong-royong (bekerja bersama-sama) untuk Revolusi Indonesia dalam melawan imperialisme.

Pengaruh kebijakan Soekarno terhadap persoalan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat nampak dalam tajuk *Trompet Masyarakat* edisi Kamis 6 April 1965 berjudul "Untuk Meningkatkan Terus Pengetahuan Teknis Masing-Masing. Bung Karno menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus mengeksploitasi sumber daya alam secara optimal agar dapat berdiri di atas kaki sendiri dan bukan untuk kepentingan imperialis namun demi kesejahteraan sosial. Kemudian untuk menjunjung tinggi anjuran Bung Karno untuk berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari), maka Direksi Pabrik Rokok Faroka yang terdapat di Malang sepakat untuk menyerahkan perusahaannya kepada pemerintahan Soekarno. Persetujuan pihak Faroka atas pengambilalihan perusahaan terdapat pada halaman depan *Trompet Masyarakat* edisi Sabtu 15 Mei 1965 dengan judul "Direksi Faroka Setuju Diambil Alih," dengan ditandatanganinya surat nomor Far 48/ 1965 oleh Sujatmiko Wijonarko (Direktur Pabrik Rokok Faroka).

Berita yang berjudul "Pernyataan Bersama, SBRI dan Kesatuan Buruh Rokok Marhaen tentang Pabrik Faroka," *Trompet Masyarakat* edisi Sabtu 15 Mei 1965, memperkuat keputusan direksi Faroka tentang penyerahan perusahaan pada pemerintah. Berdasarkan rapat anggota bersama kesatuan buruh rokok Faroka SA dengan pimpinan cabang Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) Malang I (Faroka), pada tanggal 7 Mei 1965 bertempat di kantor Faroka Malang, telah sepakat untuk menyerahkan perusahaan sepenuhnya pada pemerintah. Penguasaan perusahaan-perusahaan asing seluruhnya tanpa mengecualikan perusahaan berasal dari negara manapun ditetapkan oleh Soekarno dalam pidato "Banting Setir" pada pembukaan sidang umum MPRS ke III tanggal 11 April 1965. Menurut Soekarno, penetapan terkait penguasaan perusahaan-perusahaan asing sesuai dengan prinsip berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi dan "banting setir" dalam segala bidang.

Permasalahan koperasi juga tidak terlepas ikut dibahas oleh Soekarno dalam tajuk *Trompet Masyarakat* edisi Sabtu 19 November 1960 berjudul "Pemerintah Tak Akan Membiarkan Koperasi Bersaing Bebas dengan Usaha-Usaha Swasta." Koperasi yang berazaskan kekeluargaan dan sesuai dengan Manifesto politik/ Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (Manipol/ USDEK), memegang peranan penting dalam mewujudkan ekonomi yang sosialis. Keberadaan koperasi sebagai jantung ekonomi masyarakat ternyata semakin melemah dan tidak dapat bersaing dengan pihak-pihak swasta. Pemerintahan Soekarno memberikan beberapa solusi untuk mengatasi

persoalan melemahnya koperasi, salah satunya ialah dengan memberikan bantuan dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Di samping itu, pihak-pihak swasta juga akan diatur sedemikian hingga berbentuk koperasi. Tidak hanya itu saja, pendidikan dan pelatihan selama 2 minggu juga telah diberikan kepada 40 kepala koperasi di Jawa Timur demi mewujudkan ekonomi sosialis yang berlandaskan pada Manipol/USDEK.

Slogan-slogan Soekarno terutama Manipol/USDEK bagi media cetak merupakan panduan yang harus diikuti dan diterima tanpa sikap kritis, sebagaimana yang dikehendaki oleh penguasa. Bagi para pendukung kekuasaan Presiden Soekarno, Manipol/USDEK dianggap sebagai *Manifest Destiny* (Manifes Takdir), sebagai sebuah berkah yang tidak dapat dibantah. Namun bagi para penentangannya, ia dipandang sebagai *Manifold Irony* (ironi berlipat-ganda), karena tidak masuk akal, saling bertentangan dan syarat dengan slogan. Presiden Soekarno memang sedang menuju puncak kekuasaan dan ingin menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini dengan aneka lambang, slogan dan pidato yang berapi-api.

Lawan-lawan revolusi menurut Soekarno adalah kapitalisme dan imperialisme dengan antek-anteknya maka suara pers Indonesia umumnya serentak melawan kekuatan dan negara pendukung lawan revolusi itu. Dalam hal ini surat kabar *Trompet Masyarakat* sangat aktif mendukung kebijakan politik Soekarno. Sejumlah surat kabar yang terbit, mewakili berbagai partai dan keyakinan politik, harus memberikan sebagian besar halamannya (yang hanya 4 atau 8 halaman) untuk memuat pernyataan-pernyataan ideologis pemerintah yang sarat dengan pengulangan belaka ketimbang tentang kebijakan dan program yang realistik. Tinggal sedikit tersisa halaman untuk berita-berita hasil liputan wartawannya sendiri. Pers cenderung berlomba dan saling mengklaim bahwa dirinya lebih revolusioner dan paling setia kepada Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Dalam konteks ini pers memang benar-benar telah terkooptasi dan mengalami proses “manipolisasi dan NASAKOMisasi” dengan implikasi tidak adanya kritik-kritik sosial yang terbuka dan langsung ditujukan kepada pemerintah.

Indonesia Keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Kebijakan Presiden Soekarno terkait keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB dimuat dalam *Trompet Masyarakat* edisi Selasa 5 Januari, 1965, pada kolom “Sentilan.” Soekarno akan keluar dari keanggotaan PBB jika Malaysia diterima menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. *Trompet Masyarakat*

menyuarakan suara-suara Bung Karno yang juga merupakan suara rakyat secara lantang. Bung Karno berkeras hati untuk tetap yakin akan keputusan yang telah diambilnya, yakni tetap keluar dari keanggotaan PBB dan tidak ingin turut serta dalam dominasi kaum-kaum imperialis.

Pada akhirnya, dalam *Trompet Masyarakat* edisi 5 Januari 1965, Soekarno mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan pengunduran dirinya dari PBB pada berita yang berjudul “Surat Permintaan Keluar dari PBB Dipersiapkan.” Delegasi Indonesia juga ikut menyampaikan kepada Sekjen PBB, U Thant beserta ketua Majelis Umum PBB, Alex Quaison Saekey tentang keputusan Indonesia untuk keluar dari PBB. Keseriusan Soekarno ini dibuktikan dengan tulisan pada edisi 7 Januari 1965 berjudul “Delegasi Indonesia Kembali ke Tanah Air,” enam anggota delegasi Indonesia dalam PBB pada tahun persidangan Majelis Umum PBB, telah meninggalkan New York untuk kembali ke tanah air.

Soekarno mengumumkan kebijakannya kepada seluruh dunia, bahwa RI secara tegas keluar dari keanggotaan PBB, dalam *Trompet Masyarakat* edisi Sabtu 9 Januari 1965 pada tajuk yang berjudul “Indonesia Keluar dari PBB Seluruh Dunia Geger.” Soekarno juga memerintahkan Indonesia untuk keluar dari PBB terkait pembentukan Malaysia sebagai Dewan Keamanan PBB akhirnya membuat “dunia geger.” Ditegaskan bahwa keluarnya Indonesia dari PBB bukan hanya sekedar keluar meninggalkan sidang, namun juga keluar sebagai anggota PBB.

Presiden dalam pidatonya juga menyampaikan kegembiraan yang mendalam bahwa kebijakan-kebijakannya ternyata mendapat dukungan yang sepenuhnya dari seluruh rakyat Indonesia. Tanggapan Kepala Dinas Penerangan PBB, James Markey terhadap kebijakan-kebijakan Soekarno tertuang dalam *Trompet Masyarakat* edisi Selasa, 14 Januari 1965 pada tajuk yang berjudul “Presiden Soekarno=George Washington Indonesia.” Ia mengatakan, bahwa Presiden Soekarno dipandang oleh rakyat Indonesia sebagai George Washington dari Indonesia yang secara praktis selalu mendapat dukungan dari rakyat dan militer. Soekarno memberikan penjelasan terkait kebijakannya keluar dari keanggotaan PBB dalam *Trompet Masyarakat* edisi Selasa, 14 Januari 1965 pada tajuk yang berjudul “Tidak Akibatkan Perburukan Ekonomi.” Soekarno menjelaskan, bahwa dengan keluarnya Indonesia dari PBB tidak akan mengakibatkan perburukan ekonomi. Soekarno menyakini bahwa mahkota yang sejati dari kemerdekaan bukanlah ikut dalam keanggotaan PBB namun memperkuat persatuan bangsa untuk “berdiri di atas kaki kita sendiri.”

Pemberedelan *Trompet Masjarakat*

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) membawa dampak yang sangat besar bagi *Trompet Masjarakat*. Pihak militer menerapkan sejumlah peraturan yang ketat terhadap pers. Segala perlakuan yang ketat dan keras diterapkan pada surat kabar yang dianggap terlibat dengan peristiwa G30S 1965. Tidak ada toleransi bagi pers yang dianggap memiliki keterlibatan atau mendukung peristiwa tersebut. Pers akan dihukum dengan cara ditangkap Dewan Redaksinya dan diberedel usaha penerbitan atau percetakannya. Surat kabar yang gencar melakukan pemberitaan yang tidak pro terhadap penguasa akan segera diberedel. Tidak hanya *Trompet Masjarakat* yang diberedel namun juga beberapa surat kabar yang lainnya, diantaranya Jalan Rakyat, Jawa Timur dan Mingguana Indonesia.

Pangdam VIII/ Brawijaya berkeinginan mengeluarkan aturan khusus terhadap pers pasca peristiwa G30S 1965. Izin khusus diberikan oleh militer kepada surat-surat kabar yang dianggap tidak terlibat dalam peristiwa G30S 1965, seperti Surabaya Pos, Jawa Pos, Suara Rakyat, Harian Umum dan sebagainya (Tatang Istiawan, 1994: 110). Sementara itu surat kabar Jalan Rakyat dan Jawa Timur serta Mingguana Indonesia yang dianggap terlibat dengan peristiwa G30S 1965 oleh pihak militer dilarang terbit. Larangan ini berlaku tanggal 8 Oktober 1965 Pangdam VIII/ Brawijaya Mayjen TNI Basuki Rachmat menetapkan larangan terbit berdasarkan instruksi Menteri Penerangan nomor 12 tanggal 6 Oktober 1965. *Trompet Masjarakat* ternyata terbebas dari larangan-larangan tersebut, ini dibuktikan dengan masih diketemukannya lembaran-lembaran *Trompet Masjarakat* edisi 6 dan 9 Oktober 1965. Pada tanggal 6 dan 9 Oktober, *Trompet Masjarakat* masih dapat terbit, saat Harian Jalan Rakyat dan Jawa Timur, sudah dilarang penerbitannya (Oei Hiem Hwie, 2015: 100-101).

Sebuah berita yang dimuat dalam kolom kecil yang berjudul "*Trompet Masjarakat* Dilarang Terbit," pada harian Manifesto edisi 10 November, 1965, memperlihatkan larangan *Trompet Masjarakat* yang resmi dikeluarkan oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (PEPELRADA) Jawa Timur. *Trompet Masjarakat* dianggap berafiliasi dengan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dan Barisan Tani Indonesia (BTI). Pada akhirnya, harian ini secara resmi mulai hari Senin tanggal 11 Oktober 1965 dinyatakan dilarang terbit dan keputusan resmi tentang pelarangan terbit ini dikeluarkan oleh PEPELRADA Jawa Timur.

Dampak Pemberedelan *Trompet Masjarakat*

Pasca-peristiwa G30S 1965, *Trompet Masjarakat* praktis tidak terbit kembali setelah edisi 9 Oktober

1965. Keanggotaan Dewan Redaksi terhadap pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dipecat dan kemudian ditangkap dengan tuduhan sebagai pendukung peristiwa G30S. Dewan Redaksi yang ditangkap oleh militer antara lain, Manan S. Adinda, Saleh Said, Soeprijadi Tomodiharjo BA., D. Widodo Putro, Goei Poo Aan, M. Al-Hadar, M. Masahal, dan Nio Ham Djo.

Salah satu wartawan *Trompet Masjarakat* bernama Oei Hiem Hwie (Oei Hiem Hwie, 2015: 95) yang bertugas di kantor cabang Malang (beralamat di Jalan Klojen Kidul 29 Malang) juga mengalami aksi penahanan oleh pihak militer. Pada akhir Oktober 1965, ia hanya dikenakan wajib lapor oleh Komando Distrik Militer (KODIM) Malang, namun pada hari keempat wajib lapor, Oei tak diperkenankan pulang. Ia ditahan dan dibawa menggunakan "Jeep" dengan dikawal 3 orang tentara bersenjata laras panjang menuju ke Kamp Gapsin. Dari para Tahanan Politik (Tapol) yang lebih dulu berada di Kamp Gapsin, terdengar bahwa Goei Poo Aan pernah ditahan di tempat ini, tetapi tidak lama kemudian dipindahkan ke Penjara Lowokwaru Malang dan saat dipindahkan ia sedang menderita sakit keras.

Pada 12 Januari 1966, Oei Hiem Hwie dipindahkan dari Kamp Gapsin ke Penjara Lowokwaru Malang dan disini ia juga bertemu Na Hong Siong, koordinator wartawan *Trompet Masjarakat* di Malang yang juga merupakan pemilik percetakan ABC. Selama beberapa hari di penjara ini, Oei masih belum dapat menemukan keberadaan Goei Poo Aan, yang menurut kabar dari Kamp Gapsin telah dipindahkan ke penjara ini. Oei akhirnya mendapatkan informasi dari para Tapol yang sebelumnya berada di penjara ini. Goei Poo Aan sudah "dibon" keluar, tidak lama setelah ia sampai di penjara ini dan ia dibunuh dengan cara diseret menggunakan mobil. Beberapa minggu setelah Soekarno meninggal dunia (21 Juni 1970), Oei Hiem Hwie yang masuk dalam kriteria Golongan B (I. G. Krisnadi, 2000: 78-93) bersama ribuan Tapol dikirim ke Pulau Buru (Kepulauan Maluku) dalam pemberangkatan gelombang ke-2 (Oei Hiem Hwie, 2015: 147).

4. Kesimpulan

Agresi Militer Pertama menandai awal kelahiran *Trompet Masjarakat* yang senantiasa menyuarakan kebijakan-kebijakan Soekarno secara tegas dan lantang. Kebijakannya mulai diperlihatkan pertama kali pada berita-berita yang dimuat dalam majalah *Trompet Masjarakat* edisi 20 September 1947. Rakyat Indonesia yang berada di daerah yang dikuasai pihak Belanda mengalami perlakuan sewenang-wenang dari pihak Belanda. Segala aktivitas mereka dibatasi dan

mendapatkan pengawasan secara ketat dari *Veiligheids Dienst Mariniers Brigade* (VDMB), *Inlichtingen en Veiligheidsgroep* (IVG) dan *Netherlands Forces Intelligence Service* (NEFIS) khususnya dalam aktivitas persuratkabaran, sehingga kaum “Republikein” melaksanakan aktivitas persnya secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui pihak Belanda.

Surat kabar yang tidak kooperatif dan tidak sejalan dengan pihak Belanda diberedel. Pihak Belanda seringkali melakukan pemeriksaan Dewan Redaksi dan memberedel *Trompet Masyarakat* untuk meredam pembelaannya terhadap “kaum kecil” yaitu rakyat Indonesia yang ditindas dan diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak Belanda. Majalah ini melawan kebijakan pihak Belanda dengan menggunakan cara-cara Soekarno dalam melakukan pembelaan kaum kecil” yang selalu menjadi korban dari segala kebijakan pemerintahan Belanda yang tidak mampu menciptakan situasi yang kondusif di masyarakat. Beberapa aksi pemberedelan yang dilakukan oleh pihak Belanda yang membuat *Trompet Masyarakat* berhenti terbit di antaranya, pemberedelan selama 41 hari (23 Oktober-2 Desember 1948) peristiwa *Trompet Masyarakat* edisi 23 Oktober 1948, terkait berita yang berjudul “Tegen Resolusi dari Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) Mojokerto” dan “Razia Agustus.”

Sejak bertindak sebagai Direktur Utama *Trompet Masyarakat* di Surabaya, Goei Poo Aan memperlihatkan eksistensi majalah ini dengan terbitan yang berkualitas pada masa Agresi Militer Belanda Pertama. Sebagai seorang “Republikein,” Goei Poo Aan memiliki kekaguman terhadap sosok Soekarno, terwujud dalam perilaku dan ide-idenya yang dituangkan pada karya-karya jurnalistik. Pembelaan Soekarno terhadap rakyat kecil mengilhaminya di dalam aktivitas persuratkabaran, sehingga hampir setiap terbitan *Trompet Masyarakat* dalam tajuk berita memunculkan ajaran dan kebijakan pemerintahan Soekarno.

Trompet Masyarakat melakukan pembelaan terhadap “kaum kecil” sebagaimana ide-ide Soekarno, Marhaen, yang tertuang dalam slogan “Soeara Kaoem Ketjil Bebas Segala Pengaroh.” Slogan ini memperlihatkan gambaran kondisi masyarakat pada masa Agresi Militer Belanda Pertama. Suara-suara rakyat jelata yang tidak bersedia bekerja sama demi kepentingan pemerintahan Belanda, menjadi sebuah kalimat penting yang memberikan motivasi dalam sepak terjang majalah ini. Slogan *Trompet Masyarakat* yang diciptakan oleh Goei Poo Aan di Surabaya, terinspirasi dari kekagumannya terhadap sosok Presiden Soekarno yang memperjuangkan nasib “kaum kecil” untuk

mendapatkan kebahagiaan hidup. Semangat Soekarno dibawa oleh Goei Poo Aan melalui slogan majalah dan tidak hanya digunakan sebagai identitas sebuah majalah, namun juga sebagai pembakar semangat Dewan Redaksi serta pembaca-pembacanya dalam menegakkan kemerdekaan.

Dewan Redaksi *Trompet Masyarakat* melawan pihak Belanda dengan cara memuat pemberitaan yang di dalamnya terdapat kritik-kritik yang condong membela serta menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Berita-berita yang dimuat majalah *Trompet Masyarakat* edisi pertama tanggal 20 September 1947, mencerminkan peran utama pers yang berhaluan “Republikein” sebagai media penerangan terhadap rakyat Indonesia yang berada di daerah-daerah kekuasaan Belanda. Perlawanan majalah ini terhadap pihak Belanda ditunjukkan dalam edisi pertama yang berjudul “Tersapunya Tenaga-Tenaga Di Semua Lapangan yang Merugikan Kepentingan Kaum Kecil Berarti Kembalinya Kepercayaan Rakyat Segala Bangsa.” *Trompet Masyarakat* kembali secara tegas mendukung perjuangan “kaum kecil” dalam melawan kebijakan-kebijakan Belanda pada edisi kedua, 30 Oktober 1947, berjudul “Terputernya Gambar Masyarakat.”

Pada masa Agresi Militer Belanda, *Trompet Masyarakat* mengartikan “kaum kecil” sebagai rakyat Indonesia yang dijajah, sedangkan pada demokrasi liberal “kaum kecil” merupakan rakyat jelata yang tertindas oleh sistem kapitalis. Peristiwa “Razia Agustus” dikenal sebagai peristiwa ditangkapnya Goei Poo Aan atas tulisan yang dimuatnya dalam *Trompet Masyarakat* edisi 13 Agustus 1951 berjudul “Kaum Kiri Tetap Buat Sasaran Karena Banyak Koloni Ke-V Bersarang dalam Pemerintahan bergandengan dengan Kapitalis Imperialis Asing” dan di dalam *Trompet Masyarakat* edisi 18 Agustus 1951 berjudul “*Trompet Masyarakat* Sesalkan Cara Penangkapan Orang-Orang Penting di Jakarta Pemerintah Seakan-Akan Mata Gelap Dalam Hal Ini Pemerintah Belanda Masih Lebih Bijaksana.” Pada akhir tahun 1955, *Trompet Masyarakat* melakukan pembelaan terhadap “kaum kecil” yang berada pada Serikat Buruh Kendaraan Bermotor (SBKB) Surabaya dan Serikat Buruh Es (SBE) Ranting Petojo.

Kekuatan-kekuatan politik yang muncul dalam panggung kekuasaan pada masa Demokrasi Terpimpin adalah kekuatan antara Presiden Soekarno dan TNI-AD. Dalam hal ini, aura kekuasaan Presiden Soekarno semakin efektif dan besar, dengan kegemarannya berpidato dan membuat akronim slogan-slogan yang hebat. Sejak dimulainya Demokrasi Terpimpin tahun 1959, semua penerbitan pers di Indonesia, baik majalah maupun surat kabar harian, diharuskan memuat “Ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung

Karno,” baik yang berupa pidato-pidato kenegaraan maupun tulisan-tulisan yang lain. *Trompet Masyarakat* edisi 6 Oktober 1965, memuat “Ajaran-Ajaran Bung Karno” secara serial hingga mencapai seri ke-201. Edisi ini memuat ajaran-ajaran tentang “Apa sebab Turki Memisahkan Agama dari Negara?” Bentuk interaksi antara kebijakan Soekarno dan *Trompet Masyarakat* tercermin pada edisi Sabtu 26 Maret 1965 yang memuat berita berjudul “Presiden Soekarno: Marhaenisme adalah Teori Perjuangan.” Doktrin NASAKOM nampak pada tajuk *Trompet Masyarakat* edisi 5 Januari 1965 yang berjudul “Ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno: Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme.” Keinginan Soekarno untuk memperkuat posisi NASAKOM dan pemerintah sebagai alat untuk mencapai keberhasilan revolusi terlihat pada halaman utama *Trompet Masyarakat* edisi Sabtu 26 Januari 1965, yang berjudul “Angkatan ’45 harus berdiri di atas golongan dan partai.” Nilai-nilai NASAKOM yang terkandung di dalam Pancasila dikupas oleh Soekarno pada *Trompet Masyarakat* edisi Kamis 4 Juni 1965 yang berjudul “Pancasila jika Diperas jadi Gotong Royong dan NASAKOM.”

Pasca-peristiwa G30S 1965, *Trompet Masyarakat* praktis tidak terbit kembali setelah edisi 9 Oktober 1965. Keanggotaan Dewan Redaksi terhadap pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dipecat dan kemudian ditangkap dengan tuduhan sebagai pendukung peristiwa G30S. Dewan Redaksi yang ditangkap oleh militer antara lain, Manan S. Adinda, Saleh Said, Soeprijadi Tomodiharjo BA., D. Widodo Putro, Goei Poo Aan, M. Al-Hadar, M. Masahal, dan Nio Ham Djo.

Daftar Pustaka

- Adams, Cindi *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*. Jakarta: Yayasan Bung Karno dan Media Pressindo, 2007.
- Ahmadi, T. *Sistem Pers Indonesia*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1985.
- Al-Rahab, Amiruddin. *Ekonomi Berdikari Soekarno*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2014.
- Anwar, Rosihan. *Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia Jilid 7, Kisah-Kisah Zaman Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta: Kompas, 2015.
- Budiardjo, Miriam. *Dasari-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: CV PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Daymon, Christine. Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations & Marketing Communications*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2008.
- Dekker, Nyoman. *Sejarah Revolusi Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia, 1982.
- Huen, P. Lim Pui, et.al. *Sejarah Lisan di Asia Tenggara dan Metode*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2000.
- Hwie, Oei Hiem. *Memoar Oei Hiem Hwie, dari Pulau Buru sampai Medayu Agung*. Surabaya: PT. Wastu Lanas Grafika, 2015.
- Istiawan, Tatang. *Pers Jatim dari Masa ke Masa*. Surabaya: SPS Cabang Jatim, 1994.
- J. Severin, Werner, James W. Tankard, Jr. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan terapan di Dalam Media Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001.
- Kartodirjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Teori dan Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1983.
- Kasdi, Aminudin. *Memahami Sejarah*. Surabaya: UNESA University Press, 2001.
- Krisnadi, I. G. *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2000.
- Kuntowijoyo. *Penjelasan Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Pranoto, Suhartono W. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rachmadi, F. *Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*. Jakarta: PT Gramedia, 1990.
- Ricklefs, M. C. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Said, Tribuana. D. S. Moeljanto, *Perlawanan Pers Indonesia BPS Terhadap Gerakan PKI*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983.

- Said, Tribuana. Moeljanto, *Perlawanan Pers Indonesia (BPS) terhadap Gerakan PKI*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983.
- Santoso, Wartini. *Katalog Surat Kabar Koleksi Perpustakaan Nasional 1810-1984*. Jakarta: Perpustakaan-Depdikbud, 1984.
- Santoso, Wartini. *Katalog Surat Kabar Koleksi Perpustakaan Nasional 1810-1984*. Jakarta: Perpustakaan-Depdikbud, 1984.
- Setyautama, Sam. *Tokoh-Tokoh Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.
- Smith, Edward C. *Sejarah Pemberedelan Pers di Indonesia*. Jakarta: Grafiti Pers, 1983.
- Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 2*. Jakarta: Banana Books, 2016.
- Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1963.
- Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Suharno, *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.
- Suryadinata, Leo. *Prominent Indonesian Chinese: Biographical Sketches*. Singapore: Yusof Ishak Institute, 2015.
- Sutrisno, Mudji. Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan. Rev.ed.* Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Suwirta, Andi. "Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia pada Tahun 1950– 1965: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional," *Jurnal Sosiohumanika*, No. 1 (Februari, 2008), hlm. 275.
- Taufik, I. *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*. Jakarta: PT Triyinc, 1977.
- Tim Pelaksana Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Jawa Timur. *Sejarah Daerah Jawa Timur*. Surabaya: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976.
- Tim SPS Pusat. *Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia*. Jakarta: Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), 1971.